

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA
NOMOR 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby TENTANG FASILITAS
PEMBIAYAAN KPR IB-AL IJARAH MUNTAHIYAH BI AL
TAMLIK DALAM PERSPEKTIF KHES dan KUH PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

Luluk Nur Wachidatur Rohmah
NIM. C92216172



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Nur Wachidatur Rohmah

NIM : C92216172

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/ PA.Sby Tentang Fasilitas Pembiayaan KPR IB Al- Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik Dalam Perspektif KHES dan KUH Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 November 2020

Saya yang menyatakan



Luluk Nur Wachidatur Rohmah

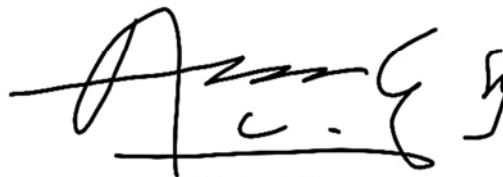
NIM. C92216172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/ PA.Sby Tentang Fasilitas Pembiayaan KPR IB Al- Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik Dalam Perspektif KHES dan KUH Perdata” yang ditulis oleh Luluk Nur Wachidatur Rohmah NIM. C92216172 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 27 November Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

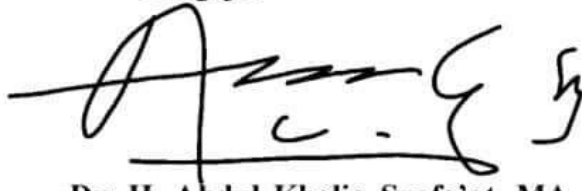
NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Nur Wachidatur Rohmah NIM. C92216172 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji II



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Ahmad Safiuddin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 22 Desember 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Nur Wachidatur Rohmah
NIM : C92216172
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : luluknur68@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby
TENTANG FASILITAS PEMBIAYAAN KPR IB-AL IJARAH MUNTAHIYAH BI
AL TAMLIK DALAM PERSPEKTIF KHES DAN KUH PERDATA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2021
Penulis

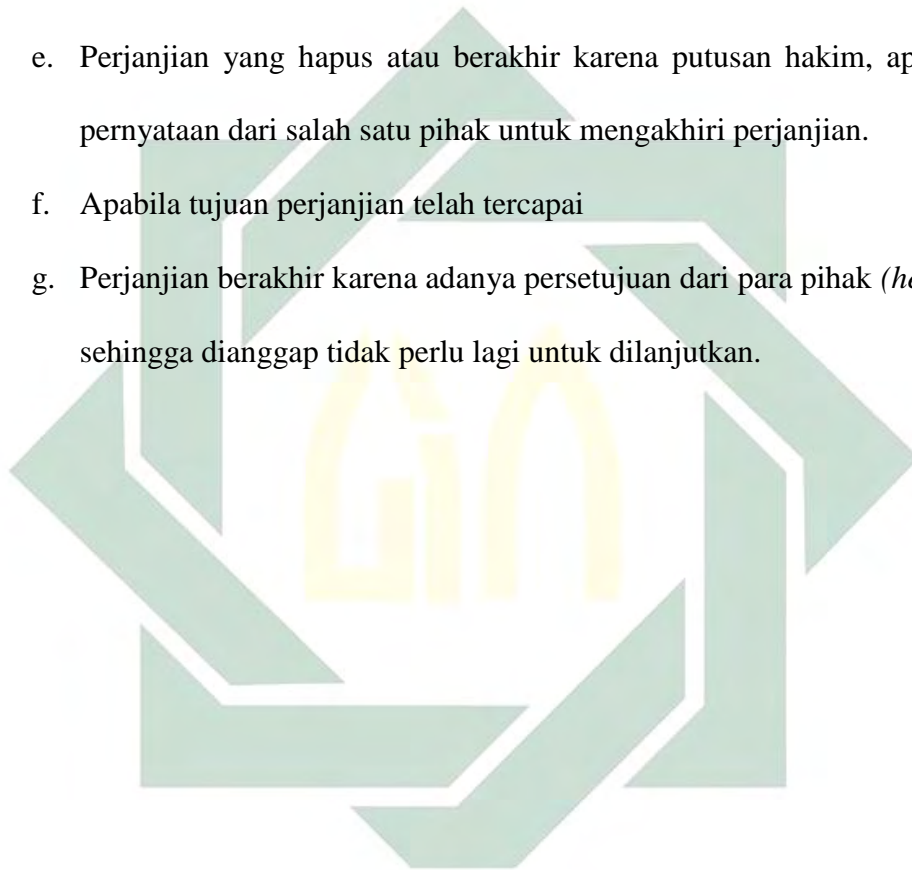
Luluk Nur Wachidatur Rohmah
NIM. C92216172

Begitu pula di Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A yang menjadi pengadilan satu-satunya di Kota Surabaya, masih didominasi oleh perkara perceraian, waris, dan perwalian sehingga sampai saat ini masih sedikit kasus sengketa ekonomi syariah yang diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya. Salah satu kasus sengketa ekonomi syariah yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Surabaya yaitu kasus dengan nomor perkara 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby tentang Fasilitas Pembiayaan KPR IB- *Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik*.

Bermula dari keinginan Penggugat membeli tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya, Penggugat mengadakan perjanjian dengan PT Bank Syariah untuk mendapatkan keringanan pembelian tanah dan bangunan tersebut dengan cara mengangsur. Akan tetapi pada saat penandatanganan Akad Kredit Pembiayaan yang dimaksud, PT Bank Syariah mengalihkan akad tersebut kepada Bank Konvensional selaku Tergugat I. Pembiayaan yang dilakukan pada Bank Konvensional tersebut, isi akad dibuat seolah secara syariah dan berprinsip syariah yakni Perjanjian Pemberian Fasilitas KPR IB- *Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik* dengan mencakup ketentuan khusus dengan Akta Nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris Chandra Tandya, S.H pada tanggal 7 Mei 2015. Dalam akad Perjanjian Fasilitas KPR IB- *Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik* dengan nama yang dibuat seolah syariah tersebut, mencantumkan tentang denda sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah Bank. Sehingga dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat yang merasa dirugikan atas semua perbuatan Tergugat yang tidak sesuai akad perjanjian.

Dengan segala pertimbangan majelis hakim atas jawab-menjawab gugatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I disertai dengan melihat dan mempelajari bukti-bukti tertulis para pihak, akhirnya majelis hakim memutuskan untuk menolak

- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir atau hapus
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzergging*). *Opzergging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara.
- e. Perjanjian yang hapus atau berakhir karena putusan hakim, apabila ada pernyataan dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai
- g. Perjanjian berakhir karena adanya persetujuan dari para pihak (*herroping*), sehingga dianggap tidak perlu lagi untuk dilanjutkan.



Ujunggaluh hingga kini belum diketahui. Pada awalnya, rumah-rumah kampung Surabaya berada di atas tiang dan di atas pemukiman air. Namun karena proses tektonik yang mengangkat permukaan tanah sekitar 5-8 m per abad. Dan juga proses pengendapan yang mengajukan garis pantai sampai 7,5 cm per tahun. Kampung Surabaya menjadi kampung daratan. Pola kehidupan masyarakat asli di perkampungan Ujunggaluh adalah berburu dan memancing, seiring dengan perkembangan ruang dan waktu, pola kehidupan industri dan perdagangan. Pada saat itu, juga terjadi percampuran antara penduduk asli dan kaum pendatang. Mengingat letaknya di pantai Pulau Jawa dan bermuara di salah satu anak sungai Kali Mas (Sungai Brantas), Ujunggaluh menjadi tempat persinggahan perahu-perahu dagang. Tak mengherankan jika Ujunggaluh merupakan tempat strategis yang menghubungkan beberapa kepentingan antar kerajaan di Pulau Jawa dan kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara.

Evolusi menjadi kota besar mulai terjadi, setelah dilakukannya pemetaan wilayah oleh Muler pada tahun 1746, atas perintah Van Imhoff Gubernur Jendral Belanda untuk wilayah Hindia-Belanda (Indonesia) yang mendarat di Surabaya pada tanggal 11 April 1746. Evolusi ini berlanjut terutama pada masa 1794-1798 dimana pada masa itu, Ujunggaluh diproyeksikan sebagai kota Benteng. Pada awal abad ke 20, tepatnya tanggal 01 April 1906, oleh pemerintah Belanda, diresmikan sebuah sistem pemerintahan kota, yakni, Gemeente Soerabaia.

Sebagai kota pelabuhan dimana Islam masuk ke Pulau Jawa melalui pantai pesisir Pulau Jawa, tidak luput Ujunggaluh atau Surabaya menjadi tempat siar agama Islam. Adapun dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya kala itu, hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama Islam. Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 164 HIR untuk saling membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya secara berimbang, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi akta Perjanjian Pemberian Fasilitas KPR IB- *Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik*) merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan adanya perjanjian pemberian fasilitas KPR IB- *Al Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik* (Ketentuan Khusus) antara Tergugat I dengan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 3256 Kota Surabaya) yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai agunan oleh Penggugat kepada Tergugat I, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi pengumuman lelang pertama eksekusi hak tanggungan, tanggal 25 Maret 2019) merupakan akta otentik dan bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pengumuman lelang terhadap tanah yang di agunkan Penggugat kepada Tergugat I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna serta mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat dari Penggugat kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, Kepala Kantor Tergugat II Surabaya dan Tergugat I) merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan permohonan dari Penggugat untuk mencabut

150430/N/MOR) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan adanya syarat dan ketentuan umum dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T1.3 (fotokopi Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas KPR IB- *Al Ijarah Muntahiyah bi Al-Tamlik* (Ketentuan Khusus) Nomor 11, tanggal 7 Mei 2015) merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan adanya perjanjian pemberian fasilitas KPR IB- *Al Ijarah Muntahiyah bi Al-Tamlik* (Ketentuan Khusus) antara Penggugat dan Tergugat I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T1.4 (fotokopi sertifikat tanda bukti Hak Milik No 3256 Kota Surabaya) yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan adanya kepemilikan tanah atas nama suami Penggugat yang dijadikan agunan oleh Penggugat kepada Tergugat I, bukti tersebut juga memenuhi syarat formil serta materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T1.5 (fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 119/2015) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan adanya pemberian hak tanggungan dari Penggugat kepada Tergugat I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta materiil dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T1.6 (fotokopi sertifikat tanda bukti Hak Tanggungan Nomor 18615/2015) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan

dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan adanya pemberian hak tanggungan dari Penggugat kepada Tergugat I, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T1.7 (fotokopi Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan adanya peringatan dari Tergugat I kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T1.8 (fotokopi Surat Bank Indonesia Nomor 12/641/DPbS tanggal 7 Mei 2010 Perihal Laporan Produk dan Aktivitas Baru xxxTerm Finance IB) merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan adanya izin dari Bank Indonesia kepada Tergugat I untuk membuat produk berupa Pembiayaan xxxTerm Finance IB (struktur IMBT dengan asset atas nama nasabah) dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta materiil dan mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T1.9 (fotokopi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik*) yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan adanya produk perbankan dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I menyatakan apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan Tergugat I bukan termasuk perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan, begitu pula dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Sehingga bisa dikatakan perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau melawan hukum baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, selain itu apabila melakukan kesalahan baik itu suatu kesengajaan atau kealpaan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, dimana kerugian tersebut yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit meliputi kerugian materil maupun kerugian in-materil.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca secara teliti gugatan Penggugat kepada Tergugat tentang perbuatan melawan hukum yang seharusnya Penggugat bisa menjelaskan secara rinci perbuatan Tergugat mana yang melanggar hukum. Jika hukum itu berupa Undang-undang semestinya Penggugat dapat menunjukkan Undang-undang yang dilanggarnya beserta pasal-pasalanya. Apabila norma hukum yang lain yang dilanggarnya, maka seharusnya Penggugat mengemukakan norma apa dan bagaimana bisa dilanggar oleh Tergugat. Hal tersebut perlu dijelaskan supaya Tergugat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan jawaban atau pembelaan baik berupa pengakuan atau penyangkalan.

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

E. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby

Gugatan secara umum muncul ketika terjadi ketidakpuasan seseorang. Sebagai negara hukum atau *rechtstaat*, setiap warga Negara yang merasa hak-haknya terlanggar, berhak untuk mengajukan gugatan atau bantahan kepada pengadilan sebagai wadah atas hak-hak mereka yang terlanggar.

Dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby tersebut diatas bahwa dalam pokok perkara, majelis hakim menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dengan berbagai pertimbangan hukum, majelis hakim memutuskan perkara Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby dengan amar putusan ditolak.

Memperhatikan dari segi akad yang dibuat, akad tersebut telah sesuai sebagaimana syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata. Akad yang telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian masih harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang ada dalam suatu perjanjian. Salah satu asas perjanjian dalam Pasal 1338 ayat 3 menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika ternyata dalam kenyataannya salah satu pihak terbukti memiliki iktikad tidak baik dalam pelaksanaannya maka bisa dianggap telah melanggar pasal tersebut dan dapat dituntut balik untuk membayar ganti kerugian sebagaimana perbuatan yang dilakukan. Pada kasus ini, ada kemungkinan bahwa Penggugat memiliki iktikad tidak baik yaitu mencoba mengambil celah hukum dengan memutarbalikkan fakta dan membuat dalil perbuatan melawan hukum terhadap Bank Konvensional atas kesalahan yang

dilakukan oleh Penggugat sendiri. Disisi lain Penggugat juga tidak bisa membuktikan letak kesalahan Tergugat yang bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal inilah yang seharusnya bisa dibuktikan kepada hakim agar hakim bisa menemukan dasar kuat untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka posisi Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 181 HIR ayat 1 sudah sepantasnya majelis hakim menjatukan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar sebesar Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Adapun implikasi hukum bagi Penggugat adalah seagai berikut:

1. Bagi Penggugat, karena Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti-bukti serta data dan fakta yang kuat, maka gugatannya tidak dikabulkan. Jadi, apapun yang diharapkan oleh Penggugat ditolak oleh majelis hakim. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam gugatannya malah sebaliknya dia yang dirugikan. Selain itu, Penggugat dirugikan secara materil karena depresi apabila dinilai dengan uang adalah setara sebesar Rp 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah). Dan kerugian immateriil karena Penggugat harus membayar kuasa hukum yang membantunya selama proses persidangan ini.
2. Sedangkan bagi Tergugat, implikasinya yaitu dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka Tergugat dibebaskan dari tuntutan hukum. Maka atas dasar keputusan tersebut, dimana Tergugat dimenangkan perkaranya, dia merasa keputusan yang diambilnya dalam membuat surat perjanjian secara syariah dibenarkan dan dikuatkan oleh hakim. Sehingga dalam konteks ini dia merasa diuntungkan (dibenarkan secara hukum).

masing, maka majelis hakim dengan segala pertimbangan serta dasar-dasar nya telah menolak gugatan Penggugat, yaitu:

1. Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, yang berarti dalam Pasal tersebut terdapat unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut yaitu:
 - a. Ada perbuatan melawan hukum;
 - b. Adanya kesalahan;
 - c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - d. Adanya kerugian.
2. Dalam gugatannya, si Penggugat tidak bisa menjelaskan dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Seharusnya Penggugat bisa menjelaskan secara rinci perbuatan Tergugat mana yang melanggar hukum, jika Undang-undang yang dilanggarnya semestinya Penggugat bisa menunjukkan Undang-undang tersebut beserta pasal-pasal nya. Namun, jika hukum yang dilanggar berupa norma hukum yang lain, maka seharusnya Penggugat mengemukakan norma apa dan bagaimana bisa dilanggar oleh Tergugat.
3. Dalam bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, ternyata juga tidak dapat membuktikan letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga bisa dikatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat terkait perbuatan melawan hukum tidak berdasar dan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak.

3. Ketertiban Umum; dan/atau
4. Kesusilaan.

Bisa dikatakan sah apabila akad tersebut disepakati dalam perjanjian, dan tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah paksaan, tipuan, dan penyamaran, sebagaimana Pasal 29 KHES. Selain itu, suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian karena itu hal mutlak yang harus ada dalam perjanjian sesuai ketentuan Pasal 22-25 KHES. Untuk menjaga dan menghindari konflik, sangat penting bagi para pihak untuk mengimplementasikan asas-asas akad sesuai Pasal 21 KHES dalam suatu perjanjian yang mereka buat dan sepakati.

Dalam kasus ini, dilihat dari akad perjanjian yang dibuat oleh para pihak, Tergugat I bisa dikatakan tidak melanggar aturan-aturan yang disebutkan dalam Pasal 26 dan Pasal 29 tersebut. Selain itu akad perjanjian yang dibuat juga telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian. Meskipun dalam petitumnya Penggugat mengatakan bahwa akad perjanjian Pemberian Fasilitas KPR IB *Al-Ijarah Muntahiyah Bi Al Tamlik* yang dibuat oleh Tergugat I bertentangan dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan pada bagian mana akad perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akad perjanjian tersebut sah secara hukum Islam. Apabila ada keterangan yang mengatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian atas akad perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I, bukan sepenuhnya itu salah Tergugat I karena pada dasarnya isi perjanjian beserta klausul-klausul perjanjian tersebut telah disetujui dan ditandatangani dengan sadar oleh Penggugat

dihadapan pejabat hukum yang berwenang, sehingga kerugian yang dialami Penggugat tidak benar adanya.

Dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada putusan no. 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby, dapat dicermati bahwa para hakim ketika memberikan putusan tidak serta-merta percaya pada salah satu pihak sebelum adanya bukti-bukti maupun pengakuan dari masing-masing pihak. Setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat I disertai bukti-bukti tertulis kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa tuduhan atau gugatan Penggugat mengenai tindakan perbuatan melawan hukum itu tidak benar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Dengan putusan hakim menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut, termasuk salah satu upaya hakim dalam menghentikan perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi pihak lain. Apabila gugatan Penggugat dikabulkan dalam kondisi ini, maka pihak Tergugat I akan mengalami kerugian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh pihak Penggugat.

Benar apabila tidak selamanya Undang-undang dan KHES bisa dijadikan satu-satunya acuan atau pedoman oleh hakim ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena hakim juga memiliki wewenang untuk berijtihad sendiri ketika tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dirasa itu diperlukan demi aspek keadilan.

Oleh karena itu disini penulis mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby telah sesuai dengan Pasal 22-25, Pasal 26 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada

pelaksanaan akadnya. Akan tetapi, pada kasus ini dengan dasar perbuatan melawan hukum majelis hakim belum menerapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman dan prinsip syariah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby yang berkaitan dengan ekonomi syariah sebagaimana PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Ekonomi Syariah.

2. Analisis Putusan Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby Perspektif KUH Perdata

Melihat dan mencermati dengan seksama dari pertimbangan-pertimbangan para hakim pada putusan Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby yang berpedoman dan berdasar pada KUH Perdata, membuktikan bahwa putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Apabila dalam KHES belum diatur pasal mengenai tindakan perbuatan melawan hukum, berbeda dengan KUH Perdata yang telah mencantumkan pasal-pasal mengenai perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan tentang perbuatan melawan hukum menjadi dasar majelis hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur suatu perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian.

Dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada putusan no. 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby, dapat dicermati bahwa para hakim ketika memberikan putusan tidak serta-merta percaya pada salah satu pihak sebelum adanya bukti-bukti maupun pengakuan dari masing-masing pihak. Setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat I disertai bukti-bukti tertulis kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa tuduhan atau gugatan Penggugat mengenai tindakan perbuatan melawan hukum itu tidak benar dan tidak beralasan sehingga harus ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Dengan putusan hakim menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut, termasuk salah satu upaya hakim dalam menghentikan perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi pihak lain. Apabila gugatan Penggugat dikabulkan dalam kondisi ini, maka pihak Tergugat I akan mengalami kerugian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh pihak Penggugat. Dalam kasus ini, secara tidak langsung Penggugat telah melakukan perbuatan itikad tidak baik kepada Tergugat I karena telah melanggar pasal-pasal atau klausul yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu disini penulis mengambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby telah sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 22-25, Pasal 26 dan Pasal 29 KHES. Selain itu majelis hakim juga mengimplementasikan KUH Perdata sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 5613/Pdt.G/2018/PA.Sby. Akan tetapi majelis hakim belum menerapkan KHES sebagai dasar pada putusan ini karena kasus ini menitikberatkan masalah pada pelanggaran perbuatan melawan hukum, dalam pertimbangan-pertimbangan

